

# PENGARUH BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 – 2017

La Ode Muhammad Muthahar, Erna Tenge dan Yunus Sading

*mahmutlaode12@gmail.com*

*Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako*

## Abstract

*This research aims to determine the direct influence of Employee Spending, Capital Spending, Goods and Services Spending, Grant Spending, and Social Assistance Spending on Economic Growth and Community Welfare and the indirect effect of Employee Spending, Capital Spending, Spending on Goods and Services, Grant Spending, and Social Assistance Spending for Community Welfare through Economic Growth. The analytical method used in this research is Partial Least Square (PLS). The results of the study found that: Direct Influence (1) Employee Spending, Capital Spending have a significant effect on economic growth while Spending on Goods and Services, Grant Spending and Social Assistance Spending don't have a significant effect on Economic Growth; 2) Employee Spending, Grant Spending and Social Assistance Spending have a significant effect on the welfare of the community while Capital Spending and Spending on Goods and Services don't have a significant effect on community Welfare; Indirect Influence: Employee Spending, Capital Spending, Goods and Services Spending, Grant Spending, and Social Assistance Spending have a significant effect on Community Welfare through Economic Growth. Regional Government needs to position Regional Spending in productive activities and on target as well as the need for budget efficiency from official travel funds that can be diverted for capital spending.*

**Keywords:** *Regional Spending, Economic Growth, Community Welfare*

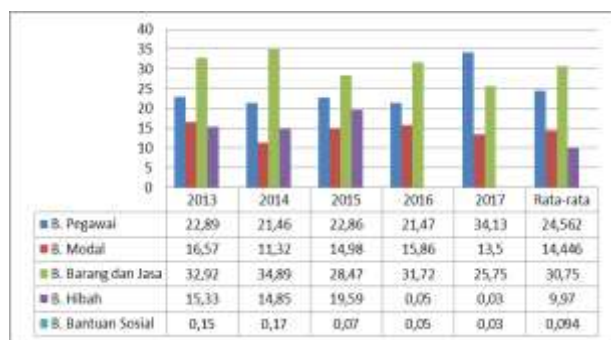
## PENDAHULUAN

Kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi cukup mengembirakan, dalam kurun waktu Tahun 2010 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,5 persen, namun dari sisi kualitas pembangunan masih harus ditingkatkan terutama dalam hal pembangunan manusia. Capaian angka IPM (Indeks pembangunan manusia) Tahun 2017 sebesar 68,11 persen, menempatkan provinsi ini berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Mengisyaratkan bahwa pembangunan manusia sebagai indikator kesejahteraan masyarakat masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerja keras serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/provinsi dalam meningkatkan

kualitas pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui peran alokatif, dimana pemerintah menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan secara efektif melalui alokasi yang tepat berdasarkan komposisi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Saat ini struktur dan alokasi belanja APBD di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dari porsi belanja pegawai yang masih sangat tinggi dibandingkan porsi belanja modal. Proporsi belanja daerah di Sulawesi Tengah dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah di Sulawesi Tengah**

Proporsi belanja pegawai Tahun 2013-2017 rata-rata 24,56 persen sedangkan untuk proporsi belanja modal periode yang sama rata-rata masih 14,44 persen dan proporsi belanja barang dan jasa rata-rata 30,75 persen. Selanjutnya proporsi belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata 9,97 persen dan 0,09 persen. Besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan dengan belanja lainnya berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah setiap tahun sebelum dan sesudah adanya kebijakan moratorium serta kenaikan gaji secara berkala ditambah lagi dengan adanya gaji 13 dan 14 dan tunjangan kinerja daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Struktur dan alokasi belanja APBD pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai yang masih sangat tinggi dibandingkan porsi belanja modal untuk pembangunan daerah sehingga belanja daerah dianggap belum memberikan dampak yang maksimal dalam pertumbuhan ekonomi, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai yang masih lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja modal serta porsi belanja yang lain pada belanja daerah. Beberapa penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

memiliki hasil yang berbeda, diantaranya penelitian Priambodo (2015) menyimpulkan bahwa belanja pegawai, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil berbeda didapatkan dalam penelitian Suryati (2015) yang menunjukkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap IPM. Berdasarkan latar belakang dan temuan penelitian terdahulu, membuka ruang penelitian tentang Pengaruh Belanja Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui berapa besar pengaruh secara langsung Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dan mengetahui berapa Besar pengaruh secara tidak langsung Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi.

## METODE

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh Belanja Daerah diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat oleh 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo

Una-Una, Kabupaten Sigi dan Kota Palu selama Tahun 2013-2017. Penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2018 sampai pada bulan April 2019.

**Metode Pengambilan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode Tahun 2013 hingga tahun 2017, maka data berbentuk *time series*. Jumlah sampel adalah tahun dari 11 daerah ditetapkan karena hal tertentu. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan gabungan antara *time series dan cross section (pooled the data)*. Keunggulan panel data seperti ini dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak (*high informational content*) bagi penelitian empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Struktural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2016), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. Teknik analisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) disusun berdasarkan langkah-langkah berikut. (1) Merancang model struktural (*inner model*), (2) Merancang model pengukuran (*outer model*), (3) Mengkonstruksi diagram jalur, (4) Konversi diagram jalur ke sistem persamaan, (5) Melakukan estimasi, (6) Melakukan evaluasi *goodness of fit model* dan (7) Melakukan pengujian terhadap hipotesis.

**Model regresi persamaan struktural**

Model untuk persamaan pengaruh langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

a. Model persamaan pengaruh langsung:

$$\begin{aligned}
 PL = & \beta_1 X_1 Y_{1it} + \beta_2 X_2 Y_{1it} + \\
 & \beta_3 X_3 Y_{1it} + \beta_4 X_4 Y_{1it} + \beta_5 X_5 Y_{1it} + \\
 & \beta_6 X_1 Y_{2it} + \beta_7 X_2 Y_{2it} + \beta_8 X_3 Y_{2it} + \\
 & \beta_9 X_4 Y_{2it} + \beta_{10} X_5 Y_{2it} \\
 & + \beta_{11} Y_1 Y_{2it} + e_{1it}
 \end{aligned}$$

b. Model persamaan pengaruh tidak langsung:

$$\begin{aligned}
 PTL = & \beta_{12} X_1 Y_1 Y_{2it} + \beta_{13} X_2 Y_1 Y_{2it} + \\
 & \beta_{14} X_3 Y_1 Y_{2it} + \beta_{15} X_4 Y_1 Y_{2it} + \beta_{16} X_5 Y_1 Y_{2it} \\
 & + e_{2it}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$Y_1$	:	Pertumbuhan Ekonomi
$Y_2$	:	Kesejahteraan Masyarakat
$X_1 Y_1$	:	Belanja Pegawai > Pertumbuhan Ekonomi
$X_2 Y_1$	:	Belanja Modal > Pertumbuhan Ekonomi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_{16}$	:	Koefisien
$X_3 Y_1$	:	Belanja Barang dan Jasa > Pertumbuhan Ekonomi
$X_4 Y_1$	:	Belanja Hibah > Pertumbuhan Ekonomi
$X_5 Y_1$	:	Belanja Bantuan Sosial > Pertumbuhan Ekonomi
$X_1 Y_2$	:	Belanja Pegawai > Kesejahteraan Masyarakat
$X_2 Y_2$	:	Belanja Modal > Kesejahteraan Masyarakat
$X_3 Y_2$	:	Belanja Barang dan Jasa > Kesejahteraan Masyarakat
$X_4 Y_2$	:	Belanja Hibah > Kesejahteraan Masyarakat
$X_5 Y_2$	:	Belanja Bantuan Sosial > Kesejahteraan Masyarakat
$Y_1 Y_2$	:	Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
$X_1 Y_1 Y_2$	:	Belanja Pegawai > Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
$X_2 Y_1 Y_2$	:	Belanja Modal > Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
$X_3 Y_1 Y_2$	:	Belanja Barang dan Jasa > Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
$X_4 Y_1 Y_2$	:	Belanja Hibah > Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
$X_5 Y_1 Y_2$	:	Belanja Bantuan Sosial > Pertumbuhan Ekonomi > Kesejahteraan Masyarakat
PL	:	Pengaruh Langsung
PTL	:	Pengaruh Tidak Langsung
$e$	:	Standard Error
$I$	:	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
$T$	:	Periode 2013-2017

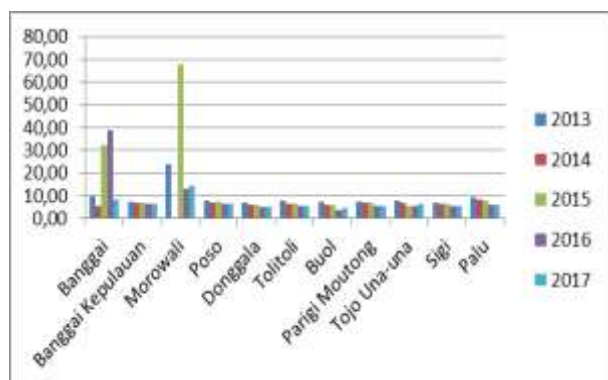
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perkembangan Belanja Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Saat ini struktur dan alokasi belanja APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai masih belum efisien. Hal itu antara lain dapat dilihat dari porsi belanja pegawai yang masih sangat tinggi dibandingkan porsi belanja modal untuk pembangunan daerah. proporsi belanja pegawai pada Pemerintah di Provinsi Sulteng Tahun 2013-2017 rata-rata 24,56 persen sedangkan untuk proporsi belanja modal dari tahun 2013-2017 rata-rata masih 14,44 persen dan proporsi belanja barang dan jasa dari tahun 2013-2017 rata-rata 30,75 persen. Selanjutnya proporsi belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2013-2017 rata-rata 9,97 persen dan 0,09 persen.

**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2013-2017 terus menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan melebihi diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dilihat pada Tahun 2016 Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Tahun 2016 mencapai 9,98 persen. Menurut gambar 1. dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif selama periode 2013-2017 sebagai berikut:



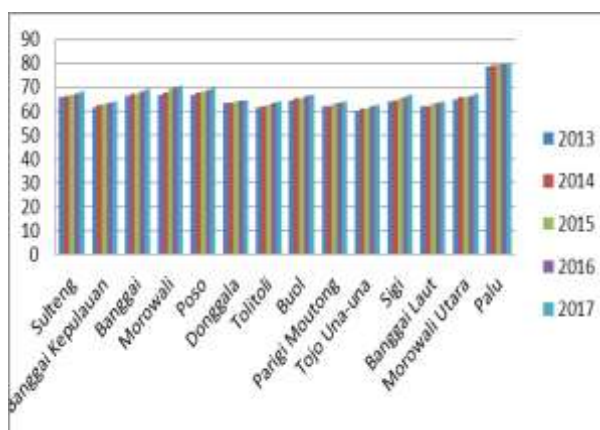
Sumber : Badan Pusat Statistik Sulteng Tahun 2016-2017 data diolah

**Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017**

**Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.**

Pembangunan manusia ini dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,00 sampai 100,00 dengan kategori sebagai berikut: sangat tinggi (IPM > 80,00); tinggi (70,00 ≤ IPM < 80); sedang (60,00 ≤ IPM < 70); dan rendah (IPM < 60,00) (Badan Pusat Statistik, 2016: 23). Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, pembangunan manusia di Sulawesi Tengah Tahun 2017 masuk kategori sedang dengan nilai IPM sebesar 68,11 meningkat 0,64 poin dari Tahun 2016 yang sebesar 67,47. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Tengah secara umum semakin membaik.

Pada gambar 2. terlihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan selama periode 2013-2017 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulteng, Tahun 2016-2017

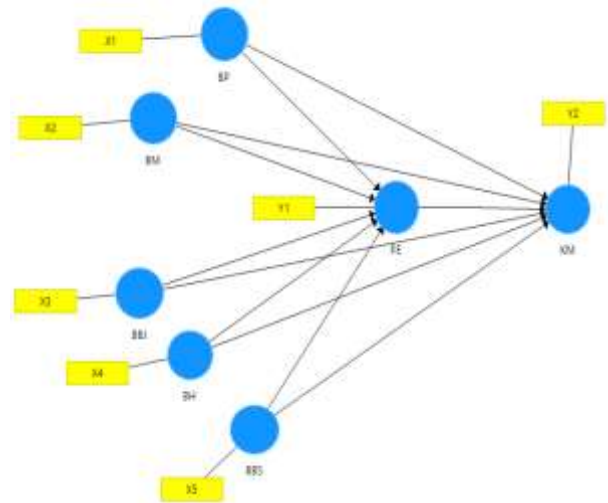
**Gambar 3. Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2013-2017**

**Analisis Jalur.**

Prosedur yang akan dilakukan untuk pengujian dalam PLS adalah merancang model struktural (*Inner Model*), Evaluasi *Measurement (Outer Model)* diantaranya yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas (*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*), Evaluasi *goodness of fit Model* terhadap *Inner Model*, Hasil Pengujian variabel intervening, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

**Merancang Model Struktural (*Inner Model*)**

Model struktural menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen, baik variabel dependen intervening maupun variabel dependen tergantung, yaitu pengaruh Belanja Pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengaruh Belanja Barang/Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengaruh Belanja Hibah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah Model Struktural:



**Gambar 4. Model Struktural**

**Evaluasi *Measurement (Outer Model)***

Melakukan evaluasi digunakan 2 pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Sedangkan Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan kuesioner penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian yang reliable atau tidak. Untuk cara uji validitas dengan melihat nilai *Cross Loading* Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Adapun Nilai *Cross Loading* dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

**Tabel 1. Nilai *Cross Loading***

	Belanja Pegawai	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Masyarakat
X1	1.000	0.438	0.731	0.085	-0.136	0.377	0.646
X2	0.438	1.000	0.635	-0.188	0.236	0.388	0.317
X3	0.731	0.635	1.000	-0.047	-0.090	0.373	0.473

X4	0.085	-0.188	-0.047	1.000	-0.033	0.001	-0.100
X5	-0,136	0.236	-0.090	-0.033	1.000	-0.008	0.165
Y1	0.377	0.388	0.373	0.001	-0.008	1.000	0.514
Y2	0.646	0.317	0.473	-0.100	0.165	0.514	1.000

Sumber: Data diolah menggunakan PLS, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator X1 mempunyai *loading factor* kepada konstruk Belanja Pegawai lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Sebagai ilustrasi *loading factor* X1 kepada Belanja Pegawai adalah sebesar 1,000 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada Belanja Modal (0,438), Belanja Barang/Jasa (0,731), Belanja Hibah (0,085), Belanja Bantuan Sosial (-0,136), Pertumbuhan Ekonomi (0,377) dan Kesejahteraan Masyarakat (0,646). Hal serupa juga terjadi pada indikator yang lain. Dengan demikian, syarat validitas diskriminan pada kasus penelitian ini terpenuhi.

Pengujian Reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7 bahwa konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*, atau ada pula yang memaknakanannya sebagai berikut. (1) Jika nilai  $\alpha > 0,9$  maka reliabilitas sempurna, (2) Jika  $\alpha$  antara 0,7 – 0,9 maka reliabilitas tinggi, (3) Jika  $\alpha$  0,5 – 0,7 maka reliabilitas moderat, (4) Jika  $\alpha < 0,5$  maka reliabilitas rendah dan jika  $\alpha$  rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Jadi, tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Tabel 2 Berikut adalah nilai *composite reliability*.

**Tabel 2. composite reability**

	<i>Composite Reliability</i>
Belanja Pegawai	1.000
Belanja Modal	1.000

Belanja Barang dan Jasa	1.000
Belanja Hibah	1.000
Belanja Bantuan Sosial	1.000
Pertumbuhan Ekonomi	1.000
Kesejahteraan masyarakat	1.000

Sumber: Data diolah menggunakan PLS, 2019

**Evaluasi Goodness of Fit Model terhadap Inner Model**

Pada analisis PLS menggunakan *Stone Geisser Q-Square test* yang berupa nilai *Q-Square predictive relevance* dihitung berdasarkan nilai R-Square ( $R^2$ ) masing-masing variabel dependen (endogen), yaitu variabel pertumbuhan ekonomi nilai  $R_1^2$  sebesar 0.728 dan variabel Kesejahteraan Masyarakat nilai  $R_2^2$  sebesar 0.533. Dengan demikian, nilai *Q-Square predictive relevance* sebesar:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \\
 &= 1 - (1 - 0.728) (1 - 0.533) \\
 &= 1 - (0.272) (0.467) \\
 &= 0.873
 \end{aligned}$$

Diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance* sebesar 0.873 atau 87,3 persen, ini menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mampu dijelaskan oleh desentralisasi fiskal. Sedangkan sisanya 22,23 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dengan demikian, model layak dilakukan inferensi untuk pembuktian hipotesis. Stabilitas estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh dari hasil



*bootstrapping process*, ide dasar dari *bootstrap* adalah bahwa inferensi tentang suatu populasi dari data sampel (sampel → populasi) dapat dimodelkan dengan melakukan resampling data sampel dan melakukan inferensi tentang

sampel dari data yang diampelas. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t pada masing-masing jalur secara parsial diperoleh hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3. Path Coefficients**

Pengaruh antar Variabel	Koefisien Jalur	T-Statistik	P-Value
Belanja Pegawai » Pertumbuhan Ekonomi	0.355	2.142	0.033
Belanja Modal » Pertumbuhan Ekonomi	0.280	1.685	0.093
Belanja Barang dan Jasa » Pertumbuhan Ekonomi	0.019	0.071	0.944
Belanja Hibah » Pertumbuhan Ekonomi	0.037	0.354	0.723
Belanja Bantuan Sosial » Pertumbuhan Ekonomi	0.044	0.345	0.730
Belanja Pegawai » Kesejahteraan Masyarakat	0.649	4.117	0.000
Belanja Modal » Kesejahteraan Masyarakat	0.233	1.456	0.146
Belanja Barang dan Jasa » Kesejahteraan Masyarakat	0.036	0.183	0.855
Belanja Hibah » Kesejahteraan Masyarakat	0.187	2.013	0.045
Belanja Bantuan Sosial » Kesejahteraan Masyarakat	0.297	2.209	0.028
Pertumbuhan Ekonomi » Kesejahteraan Masyarakat	0.349	4.139	0.000

Keterangan: signifikansi ( $\alpha$ ) nilai *p-value*  $\leq 5\%$  dan  $\leq 10\%$   
 Sumber: Data diolah menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui koefisien jalur pada model struktural yang ditunjukkan pada output hasil dari aplikasi SmartPLS, koefisien tersebut dinyatakan sebagai *Standardized coefficients* atau dikenal dengan nilai *beta*.

**Hasil Pengujian Variabel Intervening**

Menurut Liana (2009), analisis jalur (*Path Analysis*) juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening, apabila nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung menandai

hubungan sebenarnya adalah tidak langsung dimana variabel intervening memediasi hubungan variabel eksogen dan variabel endogen, dan sebaliknya apabila nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung berarti hubungan sebenarnya adalah langsung dimana variabel intervening tidak memediasi hubungan variabel eksogen dan variabel endogen. Hasil perhitungan dari pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:



**Tabel 4. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total**

Pengaruh antar Variabel	Pengaruh Langsung (Direct Effect)	Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)	Pengaruh Total (Total Effect)
Belanja Pegawai » Pertumbuhan Ekonomi	0.355	-	0.355
Belanja Modal » Pertumbuhan Ekonomi	0.280	-	0.280
Belanja Barang dan Jasa » Pertumbuhan Ekonomi	0.019	-	0.019
Belanja Hibah » Pertumbuhan Ekonomi	0.037	-	0.037
Belanja Bantuan Sosial » Pertumbuhan Ekonomi	0.044	-	0.044
Pertumbuhan Ekonomi » Kesejahteraan Masyarakat	0.349	-	0.349
Belanja Pegawai » Kesejahteraan Masyarakat	0.649	0.015	0.664
Belanja Modal » Kesejahteraan Masyarakat	0.233	0.012	0.245
Belanja Barang dan Jasa » Kesejahteraan Masyarakat	0.036	0.007	0.043
Belanja Hibah » Kesejahteraan Masyarakat	0.187	0.013	0.2
Belanja Bantuan Sosial » Kesejahteraan Masyarakat	0.297	-0.004	0.293

Sumber: Data diolah menggunakan PLS, 2019

- Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja pegawai terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja pegawai terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ( $0,649 > 0,015$ ), Sehingga dapat disimpulkan hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja pegawai dan kesejahteraan masyarakat.
- Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) pengaruh langsung belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ( $0,233 > 0,012$ ), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja modal dan kesejahteraan masyarakat.
- Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja barang dan jasa terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) belanja barang dan jasa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ( $0,036 > 0,007$ ), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja barang dan jasa dan kesejahteraan masyarakat.
- Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja hibah terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) belanja hibah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi

(0,187 > 0,045), Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja hibah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (0,297 > -0,004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja pegawai ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,355. Artinya apabila belanja pegawai bertambah 1 persen, maka diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,355 persen. Hal ini dikarenakan besarnya proporsi belanja pegawai dalam total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan ini mencerminkan belanja daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji dan honorarium pegawai negeri di daerah sehingga akan meningkatkan penerimaan gaji dan honorarium pegawai negeri di Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Gaji dan honorarium tersebut merupakan faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai tersebut, seiring dengan kenaikan gaji dan honorarium pegawai maka terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen serta penyedia barang/jasa untuk menghasilkan dan

menyediakan barang/jasa sesuai keinginan konsumen. Respon yang baik dari produsen dan penyedia barang/jasa lokal yang mampu memproduksi dan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan pegawai negeri tersebut membuat pegawai negeri tersebut tidak perlu membeli barang dan jasa yang dihasilkan dan disediakan pada daerah lain. Hal tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut yang selanjutnya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja modal ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,280. Artinya apabila belanja modal bertambah 1 persen, maka diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,280 persen. Hal ini mengindikasikan belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota akan menimbulkan permintaan akan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Permintaan tersebut direspon dengan baik oleh produsen/penyedia barang jasa lokal untuk menyediakan barang dan jasa sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah seperti pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jembatan, bangunan dan infrastruktur lainnya. infrastruktur merupakan bagian penting dalam perekonomian mengingat fungsinya sebagai pendukung dalam kegiatan termasuk untuk mendorong kegiatan investasi, sehingga diperlukan pengeluaran pemerintah berupa belanja modal untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi di daerah

tersebut yang menyebabkan perekonomian di daerah tersebut tumbuh.

### **Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja barang dan jasa ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,019. Artinya apabila belanja barang dan jasa bertambah 1 persen, maka diikuti oleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,019 persen. Belanja barang dan jasa yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena alokasi belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, ATK, makan dan minum, dan belanja operasional lainnya yang kurang produktif sehingga tidak memberikan kontribusi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Gallaway dan Vedder (1998), kegiatan pemerintah juga dapat memiliki efek negatif pada produktivitas ekonomi, pada saat *law of diminishing return* terjadi dimana ekspansi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah akan menempatkan pengeluaran dalam kegiatan yang kurang produktif. Pada akhirnya pemerintah menjadi terlalu luas dan akan melakukan lebih banyak kegiatan yang tidak tepat sasaran. Ketika ini terjadi maka hasil negatif akan muncul dan dapat menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Belanja Hibah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja hibah ( $X_4$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,037. Artinya apabila belanja hibah bertambah 1 persen, maka diikuti oleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,037 persen.

Hal tersebut terjadi karena alokasi belanja hibah yang diberikan kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat belum diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, belanja hibah lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga dan organisasi masyarakat yang tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja hibah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada saat menjelang atau pada saat tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mengindikasikan bahwa belanja hibah digunakan oleh *incumbent* untuk melakukan pencitraan politik sehingga alokasi belanja hibah ini rawan untuk disalahgunakan dengan demikian tujuan dari belanja hibah yaitu menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak tercapai.

### **Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja bantuan sosial ( $X_5$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,044. Artinya apabila belanja bantuan sosial bertambah 1 persen, maka diikuti oleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,044 persen. Proporsi belanja bantuan sosial terhadap total belanja APBD pada Kabupaten/Kota sangat kecil. Meskipun proporsi belanja bantuan sosial terhadap belanja APBD sangat kecil, belanja bantuan sosial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota belum melaksanakan belanja bantuan sosial sesuai tujuan peruntukannya yaitu membantu masyarakat

tidak mampu yang mempunyai risiko sosial. Terdapat beberapa pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan belanja bantuan sosial diantaranya yaitu Kabupaten Banggai dari Tahun 2015-2016, Kabupaten Morowali pada Tahun 2013 dan Kabupaten Tojo Una una pada Tahun 2016. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada daerah tertinggal dimaksudkan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal melalui peningkatan kemampuan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Selain itu pemberian dana bantuan sosial ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tertinggal sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial ekonomi dan budaya. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk risiko sosial diberikan untuk membantu membiayai pengobatan bagi masyarakat miskin diluar yang ditanggung BPJS, selanjutnya yang digunakan untuk siswa tidak mampu diberikan untuk membantu siswa dan mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai keperluan sekolah atau kuliah dan untuk rumah tidak layak huni digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperbaiki rumah sehingga menjadi layak huni. Belanja bantuan sosial tersebut tentunya sangat membantu masyarakat kurang mampu.

Belanja bantuan sosial tersebut pemerintah daerah dapat membantu masyarakat tidak mampu mengurangi beban yang harus ditanggung, sehingga masyarakat tidak mampu bisa meningkatkan konsumsinya karena alokasi belanja untuk kesehatan, pendidikan dan rumah bisa dikurangi. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat tidak mampu secara agregat akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan adanya dana bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan taraf kesehatan dan

pendidikan masyarakat miskin sehingga akan meningkatkan produktivitas.

### **Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja pegawai ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,649. Artinya apabila belanja pegawai bertambah 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,649 persen. Belanja pegawai berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai diikuti dengan meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten/Kota. Secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai yang dilakukan secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik. Pelayanan publik semakin baik akan menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja modal ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,233. Artinya apabila belanja modal bertambah 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,233 persen. Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dikarenakan Serapan belanja modal pemerintah yang masih

sangat rendah saat ini akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Struktur belanja modal pun perlu mendapat perhatian khusus, karena tidak semua belanja modal berefek pada pelayanan publik. Untuk itu, belanja modal perlu dibedah lebih rinci untuk menemukan belanja modal yang berefek pada pelayanan publik, misalnya belanja modal infrastruktur. Struktur belanja pegawai pun perlu dibedah lebih rinci, karena dalam belanja pegawai, tidak saja untuk pegawai administrasi tapi juga tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berefek pada pelayanan masyarakat.

#### **Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja barang dan jasa ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,036. Artinya apabila belanja barang dan jasa bertambah 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,036 persen. Hal ini dikarenakan belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, ATK, makan dan minum, dan belanja operasional terindikasi tidak efisien karena dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menyebabkan pemborosan uang Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah terdapat beberapa temuan yang terindikasi kerugian negara/daerah pada belanja barang dan jasa yaitu kelemahan pengelolaan pengadaan

barang dan jasa pada Pemerintah kabupaten Donggala, Poso, Tolitoli dan Morowali, kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta BPK menemukan laporan keuangan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pada Pemerintah kabupaten Sigi, Bangkep dan Poso, kemudian pemahalan harga pekerjaan pada Pemerintah kabupaten Sigi, Donggala dan Morowali Utara, kemahalan harga barang (*mark-up*), dan kekurangan volume pengadaan barang dan jasa. Sebagai akibat dari pelaksanaan belanja barang dan jasa yang terindikasi menimbulkan kerugian negara/daerah menyebabkan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien.

#### **Pengaruh Belanja Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja hibah ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,187. Artinya apabila belanja hibah bertambah 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,187 persen. Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD harus diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh belanja hibah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota yang signifikan dikarenakan alokasi belanja hibah dalam APBD yang masih lebih besar dibandingkan belanja bantuan sosial, serta alokasi belanja hibah tersebut di arahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti pembinaan dan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM, dan belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja bantuan sosial ( $X_5$ ) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,297. Artinya apabila belanja bantuan sosial bertambah 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,297 persen. Pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota yang signifikan dikarenakan bantuan sosial (bansos) pada kelompok belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

### **Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,349. Artinya apabila terjadi penambahan 1 persen, maka diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,349 persen. Hal ini menandakan dalam Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula.

Penelitian ini, dari adanya peningkatan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat melalui nilai IPM yang semakin meningkat pada Kabupaten/Kota. Distribusi pendapatan yang cukup merata ini dapat dilihat berdasarkan rasio gini Provinsi Sulawesi Tengah, dimana rata-rata rasio gini selama 2013-2016 sebesar 0,37 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (BPS, 2017). Adapun rata-rata rasio gini selama 2013-2016 pada Kabupaten/Kota yaitu Banggai (0,34), Bangkep (0,31), Poso (0,34), Donggala (0,29),

Tolitoli (0,34), Buol (0,32), Parimo (0,31), Tojo Una-una (0,34) dan Sigi (0,33), termasuk dalam kategori ketimpangan rendah sedangkan Morowali (0,37) dan Palu (0,4) termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Belanja Pegawai dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2017.

Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2017.

Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2017.

Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2017.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah perlu menempatkan pengeluaran belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan social dalam kegiatan yang produktif dengan cara pemerintah dapat melakukan banyak kegiatan

yang tepat sasaran sehingga memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya fokus dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang cepat tetapi harus memperhatikan pemerataan pembangunan. Karena strategi pengembangan tersebut sangat rapuh dan peka terhadap faktor eksternal maupun perubahan ekonomi diluar wilayah.

Pemerintah Daerah perlu adanya efisiensi anggaran dari dana perjalanan dinas maupun dalam belanja pegawai, maka dana ini bisa dialihkan untuk belanja modal. Kalau belanja pegawai dapat diturunkan, maka APBD akan semakin sehat. Upaya ini dianggap lebih memberi dorongan pada sektor ekonomi, selain lebih bermanfaat bagi daerah ketimbang APBD dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai pemda. Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.

Pemerintah Daerah perlu menekan anggaran belanja barang dan jasa yang belanja operasionalnya terindikasi tidak efisien karena dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menyebabkan pemborosan uang Negara.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan artikel ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penelaah artikel yaitu Bapak Mohamad Ichwan sebagai penyunting, Bapak Patta Tope sebagai ketua penyunting, serta Ibu Erna Tenge dan Bapak Yunus Sading selaku pembimbing penelitian. Semoga artikel ini

dapat bermanfaat bagi lahirnya karya ilmiah selanjutnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2013). *Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen*. Diakses pada tanggal 11 November 2019, dari <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Sulawesi Tengah Dalam Angka*. Palu: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Sulawesi Tengah Dalam Angka*. Palu: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Sulawesi Tengah Dalam Angka*. Palu: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Sulawesi Tengah Dalam Angka*. Palu: Badan Pusat Statistik
- Deswanto, Dwi B., Asniar Ismail, Hendarmin. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3*, 187-210
- Ghozali. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Liana, L. (2009). Penggunaan Path Analysis untuk Menguji Pengaruh Variabel Intervening pada Paradigma Jalur. *Dinamika Teknik*, 3 (1), 57-68.
- Priambodo, A. (2015), Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang*.

Vedder, R., & Gallaway, L. (1998). *Government Size and Economic Growth*. Washington, DC: Joint Economic Committee